



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1627/LIT.05/10-15/03/2021
Sifat : Segera
Lampiran : Lima Berkas
Hal : Kerja Sama Survei Penilaian Integritas 2021

8 Maret 2021

**Yth. Walikota/Bupati
c.q Inspektur Daerah (Daftar Daerah Terlampir)
di Tempat**

Dalam rangka upaya pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) sejak tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal perlu disampaikan sebagai berikut:

1. SPI Tahun 2021 telah ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menjadi Prioritas Nasional dan menjadi salah satu indikator untuk mengukur pelaksanaan pencegahan korupsi pada lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
2. Kegiatan SPI bersifat *mandatory* dan akan berlangsung setiap tahun serta dilakukan di semua K/L/PD dan untuk pelaksanaan SPI 2021 pembiayaan akan ditanggung oleh DIPA KPK sehingga K/L/PD tidak perlu lagi menganggarkan seperti tahun sebelumnya.
3. Dalam melaksanakan SPI Tahun 2021, KPK akan dibantu oleh Mitra yang akan ditunjuk (informasi disampaikan kemudian) dengan peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengendali kualitas kegiatan.
4. Kegiatan SPI Tahun 2021 berada di bawah koordinasi Inspektorat Daerah dengan didampingi oleh KPK.
5. Pada tahap awal persiapan pelaksanaan SPI tahun 2021 (Maret-April), diharapkan Pemerintah Daerah untuk mulai mempersiapkan data populasi pegawai, pengguna layanan, dan eksper dengan format terlampir.
6. Laporan Hasil SPI 2019 dan *piloting e-SPI* 2020 secara umum maupun secara khusus per K/L/PD beserta rekomendasi perbaikan dapat diakses melalui JAGA.id (manual akses dan penggunaan terlampir).

Selain itu sebagai upaya *sharing knowledge*, Direktorat Monitoring (d.h Direktorat Penelitian dan Pengembangan) KPK juga telah menyusun Buku Pintar yang berisi ringkasan 125 kajian terpilih dan monitoring sistem administrasi pemerintahan yang telah dilakukan sejak tahun 2005 hingga 2019 (buku terlampir).

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Sari Angraeni (sari.angraeni@kpk.go.id) melalui telepon (021) 25578300 ext. 8045 atau Sdr. Timotius Hendrik Partohap (timotius.partohap@kpk.go.id) melalui telepon (021) 25578300 ext. 7391.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Pahala Nainggolan

Tembusan:

1. Yth. Pimpinan KPK
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
3. Yth. Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik
4. Yth. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas
5. Yth. Inspektur KPK.

Lampiran Surat 1 (FORMULIR KERJA SAMA SPI)
Nomor : B/1627 /LIT.05/10-15/03/2021
Tanggal : 8 Maret 2021

(KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :
Tanggal :

**FORMULIR KERJA SAMA SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS
TAHUN 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya bertindak dan atas nama Pemerintah Daerah

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan Survei Penilaian Integritas Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peran aktif kelembagaan ini termasuk dalam bentuk ketersediaan data seperti data pegawai, pengguna layanan, dan narasumber pakar yang dibutuhkan guna pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam pernyataan ini sekaligus menyertakan daftar *Person In-Charge* (PIC) kegiatan yang akan menjadi penghubung secara teknis kegiatan SPI Tahun 2021, yakni:

No	Nama	Jabatan	Nomor Handphone	Email

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2021
Walikota/Bupati

(.....)

Formulir yang ditandatangani dapat dikirim melalui pos ke Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950 dan melalui surat elektronik ke arrum.retnosari@kpk.go.id atau sari.angraeni@kpk.go.id, atau timotius.partohap@kpk.go.id.

Lampiran Surat 2 (FORM DATA POPULASI SPI)

Nomor : B/ 1627 /LIT.05/10-15/03/2021

Tanggal : 6 Maret 2021

Formulir Populasi Internal/Pegawai:

No	Unit Kerja	Nama Pegawai	Tanggal/Bulan/Tahun Mulai Bekerja di Unit Kerja	Jabatan	No. HP (WA) aktif	e-mail aktif
1						
dst						

Formulir Populasi Eksternal/Pengguna Layanan:

No	Unit Kerja Tempat Mengurus Layanan Publik	Nama Layanan Publik yang Diterima	Nama Pengguna Layanan	Tanggal/Bulan/Tahun Mengurus Layanan Publik	No. HP (WA) aktif	e-mail aktif
1						
dst						

Formulir Populasi Ekspert:

No	Kriteria Ekspert	Nama Ekspert	Jabatan/ Jabatan Terakhir	No. HP (WA) aktif	e-mail aktif
1	Inspektorat/Pengawas Internal				
2	Pensiunan maksimal 5 tahun terakhir (Pejabat minimal eselon II untuk K/L/Provinsi atau eselon III untuk Kabupaten/Kota)				
3	Pimpinan Lembaga minimal eselon I untuk K/L atau Kepala Daerah/Sekda untuk Provinsi/Kabupaten/Kota				
4	Auditor BPK				
5	Auditor BPKP				
6	Perwakilan Ombudsman				
7	Asosiasi pengusaha (KADIN, HIPMI, APINDO) atau pengusaha yang berpengaruh				
8	DPRD (Pimpinan DPRD dan ketua komisi yang membidangi pemerintahan (diutamakan Komisi A))				
9	Advokat				
10	Saber Pungli Kepolisian (Polres untuk Kab/Kota, Polda untuk Provinsi)				
11	Saber Pungli Kejaksaan (Kejari untuk Kab/Kota, Kejati untuk Provinsi)				
12	Saber Pungli Pengadilan (PN untuk Kab/Kota, PT untuk Provinsi)				

SPI User Manual

Korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime, satu kategori dengan terorisme dan kejahatan narkoba. Banyak upaya yang dilakukan oleh negara untuk memerangi ketiganya. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik sebagian kasusnya bahkan menjerat tokoh-tokoh politik. Peristiwa semacam ini selalu menyedot perhatian masyarakat karena terus berulang sekalipun gencar dilakukan penindakan. Belum lagi jika menilik fakta masih adanya praktik pungli (pungutan liar) pada pelayanan masyarakat. Presiden bahkan mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Langkah ini dilakukan karena sekalipun jumlahnya kecil, pungli dinilai meresahkan masyarakat. Potret ini sekaligus menunjukkan korupsi telah menjangkiti hingga ke lapis terluar birokrasi dan berhadapan langsung dengan masyarakat.

Indonesia membutuhkan gerakan bersama untuk mengatasi ini. Upaya ini minimal berfokus pada dua hal, peningkatan integritas birokrasi dan perbaikan sistem pencegahan korupsi. Untuk itu KPK yang memiliki fungsi pencegahan korupsi, bekerjasama dengan BPS menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas. Survei ini memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper). Kegiatan ini dilakukan sepanjang Bulan September-Oktober di 27 Kementerian/Lembaga, 15 Pemerintah Provinsi, dan 85 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tujuan SPI

Survei Penilaian Integritas merupakan upaya dalam memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan K/L/PD. Hasil pemetaan tersebut kemudian dapat dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan rencana aksi yang disesuaikan pada karakteristik masing-masing K/L/PD dan berdasarkan hasil pemetaan yang empiris. Sehingga, SPI dapat digunakan sebagai alternatif pengukuran korupsi.

Manfaat SPI

Hasil SPI 2019 memiliki banyak manfaat, baik bagi K/L/PD yang menjadi lokus survei maupun publik secara umum. Beberapa manfaat secara spesifik dari hasil kegiatan SPI 2019 ini antara lain:

1. Mengidentifikasi area prioritas perbaikan yang rentan terhadap korupsi, sebagai dasar perbaikan program pencegahan korupsi di dalam K/L/PD.
2. Memberikan capaian upaya pencegahan korupsi dan aktivitas antikorupsi yang sudah dilakukan K/L/PD.

3. Mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan meningkatkan kepercayaan (trust) publik pada K/L/PD secara umum.

Mengunduh Laporan Umum

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengunduh laporan umum. Laporan umum terbuka untuk umum, tidak di perlukan akses khusus untuk dapat mengakses laporan tersebut.

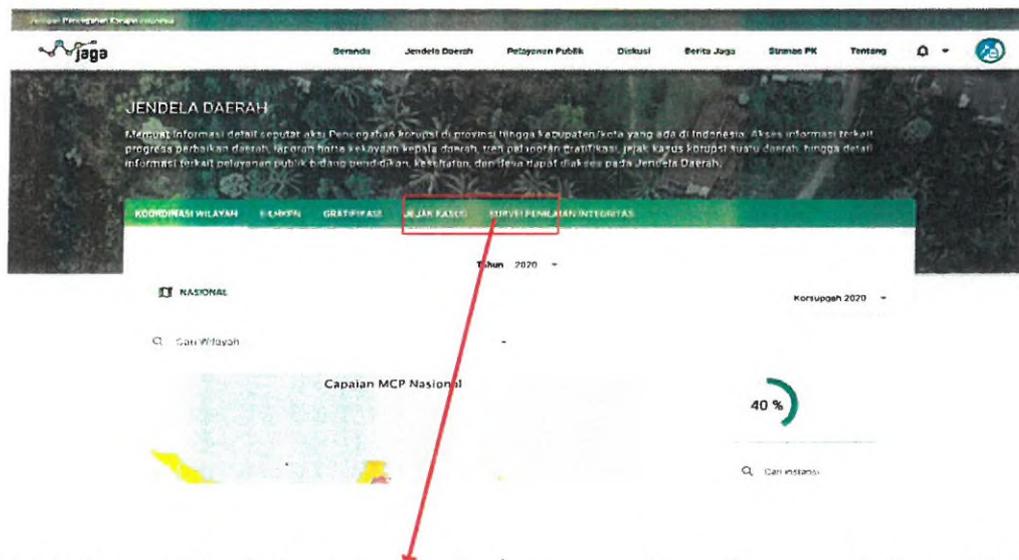
1. Buka browser dan ketik jaga.co.id
2. Scroll ke bawah di area jendela daerah



3. Kemudian *click* tombol “Buka Jendela Daerah”

BUKA JENDELA DAERAH

4. Setelah itu anda akan diarahkan ke halaman Jendela Daerah seperti gambar dibawah ini.



5. Pilih Tab “Survei Penilaian Integritas”, akan muncul tampilan seperti dibawah ini,



Daftar indeks SPI
Pemerintah daerah

Ringkasan umum SPI

Pilih tahun 2019 kemudian
click "Download E-Report"

Rangkuman umum hasil
SPI

6. Untuk mendownload Laporan Umum , pilih tahun 2019 kemudian click "Download E-Report"

Mengunduh Laporan Per KLPD

1. Untuk mendownload laporan kementerian / pemerintah daerah masing-masing, dibutuhkan akses login.
2. Buka browser dan ketik jaga.co.id

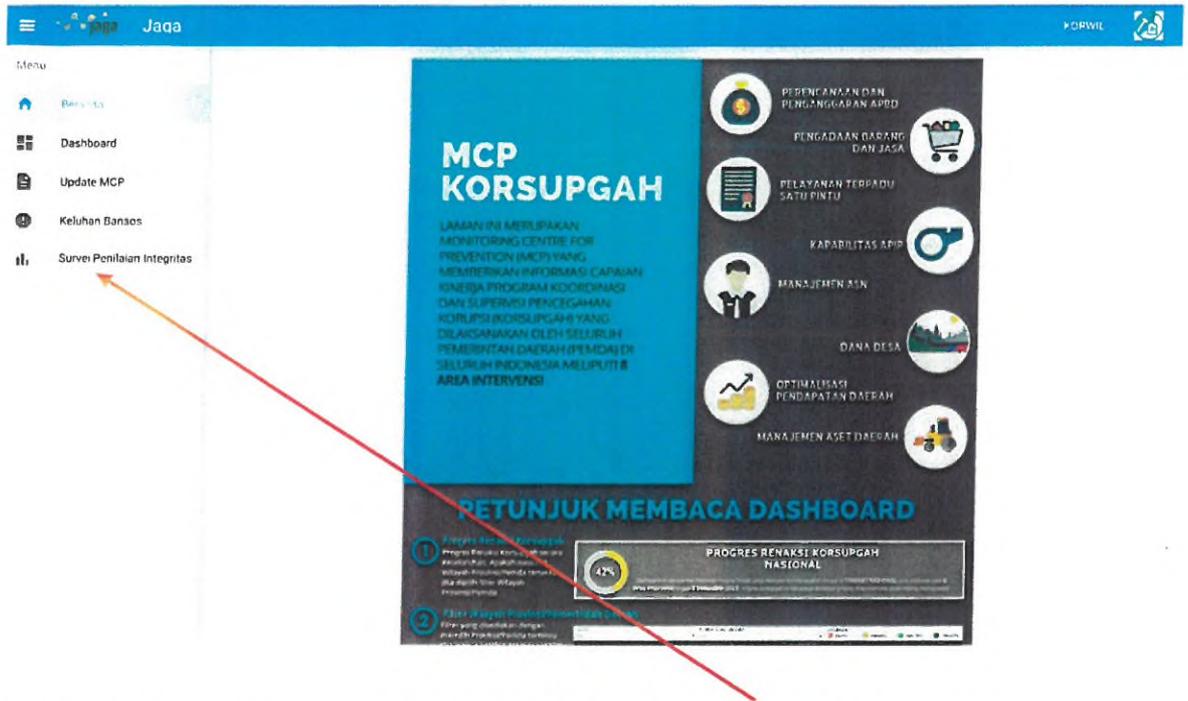
3. Masukan email/username dan password masing-masing, setelah itu click tombol **LOGIN**



4. Jika berhasil akan muncul tampilan seperti berikut, click tombol **"MONITORING KORWIL"**

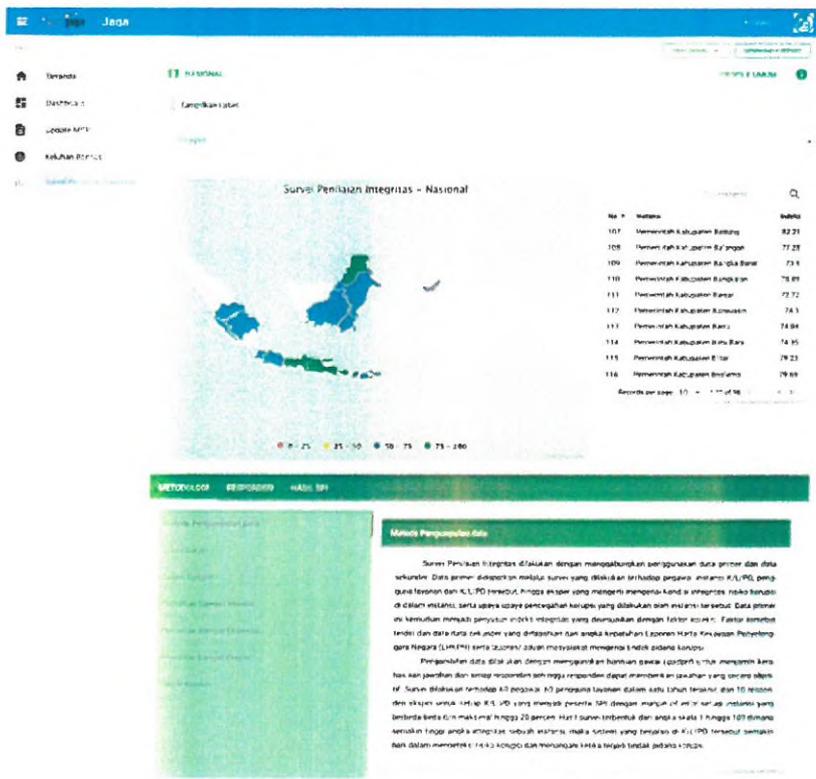


5. Anda akan diarahkan ke halaman berikut :



6. Untuk melihat data SPI KLPD anda, pilih menu “Survey Penilaian Integritas”.

7. Selanjutnya akan muncul tampilan berikut



Daftar indeks SPI Pemerintah daerah

Rangkuman hasil SPI sesuai dengan kementerian masing-masing

8. Untuk mengunduh E-Report masing-masing KLPD:

- a. "PILIH TAHUN" 2019
- b. Click "DOWNLOAD E-REPORT".

The screenshot displays the 'Survei Penilaian Integritas - Nasional' dashboard. On the left is a navigation menu with items like 'Beranda', 'Dashboard', 'Update MCP', 'Keluhan Bansos', and 'Survei Penilaian Integritas'. The main area features a map of Indonesia and a table of regional data. The table has columns for 'No', 'Instansi', 'Can instansi', and 'Indeks'. The year '2019' is selected in the top right, and the 'DOWNLOAD E-REPORT' button is visible. Red arrows from the instructions point to these elements.

No	Instansi	Can instansi	Indeks
107	Pemerintah Kabupaten Badung		82.21
108	Pemerintah Kabupaten Balangan		77.28
109	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat		73.8
110	Pemerintah Kabupaten Bangkalan		78.89
111	Pemerintah Kabupaten Banjar		72.72
112	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi		74.3
113	Pemerintah Kabupaten Baru		74.84
114	Pemerintah Kabupaten Batu Bara		74.35
115	Pemerintah Kabupaten Bitar		79.23
116	Pemerintah Kabupaten Boalemo		79.69

9. Tunggu beberapa detik report akan terdownload dalam bentuk .pdf

Lampiran Surat 4 (Daftar Penerima Surat)
Nomor : B/ 1627 /LIT.05/10-15/03/2020
Tanggal : 6 Maret 2020

Bupati/Walikota

1. Walikota Banda Aceh
2. Walikota Medan
3. Walikota Padang
4. Walikota Palembang
5. Walikota Bengkulu
6. Walikota Jambi
7. Walikota Pekanbaru
8. Walikota Tanjung Pinang
9. Walikota Pangkalpinang
10. Walikota Bandar Lampung
11. Walikota Serang
12. Walikota Bandung
13. Walikota Semarang
14. Walikota Yogyakarta
15. Walikota Surabaya
16. Walikota Pontianak
17. Walikota Banjarmasin
18. Walikota Palangkaraya
19. Walikota Samarinda
20. Walikota Denpasar
21. Walikota Mataram
22. Walikota Kupang
23. Walikota Manado
24. Walikota Makassar
25. Walikota Palu
26. Walikota Kendari
27. Walikota Gorontalo
28. Walikota Ambon
29. Walikota Tidore Kepulauan
30. Walikota Jayapura
31. Bupati Bulungan
32. Bupati Mamuju
33. Bupati Manokwari
34. Bupati Aceh Barat
35. Bupati Aceh Besar
36. Bupati Aceh Selatan
37. Bupati Aceh Singkil
38. Bupati Aceh Tengah
39. Bupati Aceh Tenggara
40. Bupati Aceh Timur
41. Bupati Aceh Utara
42. Bupati Bireuen
43. Bupati Pidie
44. Bupati Simeulue
45. Walikota Sabang
46. Walikota Langsa
47. Walikota Lhokseumawe
48. Bupati Gayo Lues
49. Bupati Aceh Barat Daya
50. Bupati Aceh Jaya
51. Bupati Nagan Raya
52. Bupati Aceh Tamiang
53. Bupati Bener Meriah
54. Bupati Pidie Jaya
55. Walikota Subulussalam
56. Bupati Asahan
57. Bupati Dairi
58. Bupati Deli Serdang
59. Bupati Karo
60. Bupati Labuhanbatu
61. Bupati Langkat
62. Bupati Mandailing Natal
63. Bupati Nias
64. Bupati Simalungun
65. Bupati Tapanuli Selatan
66. Bupati Tapanuli Tengah
67. Bupati Tapanuli Utara
68. Bupati Toba Samosir
69. Walikota Binjai
70. Walikota Pematang Siantar
71. Walikota Sibolga
72. Walikota Tanjung Balai
73. Walikota Tebing Tinggi
74. Walikota Padang Sidempuan
75. Bupati Pakpak Bharat
76. Bupati Nias Selatan
77. Bupati Humbang Hasundutan
78. Bupati Serdang Bedagai
79. Bupati Samosir
80. Bupati Batu Bara
81. Bupati Padang Lawas
82. Bupati Padang Lawas Utara
83. Bupati Labuhanbatu Selatan
84. Bupati Labuhanbatu Utara
85. Bupati Nias Utara
86. Bupati Nias Barat
87. Walikota Gunungsitoli
88. Bupati Limapuluh Kota
89. Bupati Agam
90. Bupati Kepulauan Mentawai
91. Bupati Padang Pariaman
92. Bupati Pasaman
93. Bupati Pesisir Selatan
94. Bupati Sijunjung
95. Bupati Solok
96. Bupati Tanah Datar
97. Walikota Bukit Tinggi
98. Walikota Padang Panjang
99. Walikota Payakumbuh
100. Walikota Sawahlunto
101. Walikota Solok
102. Walikota Pariaman
103. Bupati Pasaman Barat
104. Bupati Dharmasraya
105. Bupati Solok Selatan
106. Bupati Bengkalis
107. Bupati Indragiri Hilir
108. Bupati Indragiri Hulu
109. Bupati Kampar
110. Bupati Kuantan Singingi
111. Bupati Pelalawan
112. Bupati Rokan Hilir
113. Bupati Rokan Hulu
114. Bupati Siak
115. Walikota Dumai
116. Bupati Kepulauan Meranti
117. Bupati Batanghari
118. Bupati Bungo
119. Bupati Kerinci
120. Bupati Merangin
121. Bupati Muaro Jambi
122. Bupati Sarolangun
123. Bupati Tanjung Jabung Barat
124. Bupati Tanjung Jabung Timur
125. Bupati Tebo
126. Walikota Sungai Penuh
127. Bupati Lahat
128. Bupati Musi Banyuasin
129. Bupati Musi Rawas
130. Bupati Muara Enim
131. Bupati Ogan Komering Ilir
132. Bupati Ogan Komering Ulu

133. Walikota Prabumulih
134. Walikota Pagar Alam
135. Walikota Lubuk Linggau
136. Bupati Banyuasin
137. Bupati Ogan Ilir
138. Bupati OKU Timur
139. Bupati OKU Selatan
140. Bupati Empat Lawang
141. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
142. Bupati Musi Rawas Utara
143. Bupati Bengkulu Selatan
144. Bupati Bengkulu Utara
145. Bupati Rejang Lebong
146. Bupati Kaur
147. Bupati Seluma
148. Bupati Mukomuko
149. Bupati Lebong
150. Bupati Kepahiang
151. Bupati Bengkulu Tengah
152. Bupati Lampung Barat
153. Bupati Lampung Selatan
154. Bupati Lampung Tengah
155. Bupati Lampung Utara
156. Bupati Lampung Timur
157. Bupati Tanggamus
158. Bupati Tulang Bawang
159. Bupati Way Kanan
160. Walikota Metro
161. Bupati Pesawaran
162. Bupati Pringsewu
163. Bupati Mesuji
164. Bupati Tulang Bawang Barat
165. Bupati Pesisir Barat
166. Bupati Bandung
167. Bupati Bekasi
168. Bupati Bogor
169. Bupati Ciamis
170. Bupati Cianjur
171. Bupati Cirebon
172. Bupati Garut
173. Bupati Indramayu
174. Bupati Karawang
175. Bupati Kuningan
176. Bupati Majalengka
177. Bupati Purwakarta
178. Bupati Subang
179. Bupati Sukabumi
180. Bupati Sumedang
181. Bupati Tasikmalaya
182. Walikota Bekasi
183. Walikota Bogor
184. Walikota Cirebon
185. Walikota Depok
186. Walikota Sukabumi
187. Walikota Tasikmalaya
188. Walikota Cimahi
189. Walikota Banjar
190. Bupati Bandung Barat
191. Bupati Pangandaran
192. Bupati Banjarnegara
193. Bupati Banyumas
194. Bupati Batang
195. Bupati Blora
196. Bupati Boyolali
197. Bupati Brebes
198. Bupati Cilacap
199. Bupati Demak
200. Bupati Grobogan
201. Bupati Jepara
202. Bupati Karanganyar
203. Bupati Kebumen
204. Bupati Kendal
205. Bupati Klaten
206. Bupati Kudus
207. Bupati Magelang
208. Bupati Pati
209. Bupati Pekalongan
210. Bupati Pemalang
211. Bupati Purbalingga
212. Bupati Purworejo
213. Bupati Rembang
214. Bupati Semarang
215. Bupati Sragen
216. Bupati Sukoharjo
217. Bupati Tegal
218. Bupati Temanggung
219. Bupati Wonogiri
220. Bupati Wonosobo
221. Walikota Magelang
222. Walikota Pekalongan
223. Walikota Salatiga
224. Walikota Surakarta
225. Walikota Tegal
226. Bupati Bantul
227. Bupati Gunung Kidul
228. Bupati Kulon Progo
229. Bupati Sleman
230. Bupati Bangkalan
231. Bupati Banyuwangi
232. Bupati Blitar
233. Bupati Bojonegoro
234. Bupati Bondowoso
235. Bupati Gresik
236. Bupati Jember
237. Bupati Jombang
238. Bupati Kediri
239. Bupati Lamongan
240. Bupati Lumajang
241. Bupati Madiun
242. Bupati Magetan
243. Bupati Malang
244. Bupati Mojokerto
245. Bupati Nganjuk
246. Bupati Ngawi
247. Bupati Pacitan
248. Bupati Pamekasan
249. Bupati Pasuruan
250. Bupati Ponorogo
251. Bupati Probolinggo
252. Bupati Sampang
253. Bupati Sidoarjo
254. Bupati Situbondo
255. Bupati Sumenep
256. Bupati Trenggalek
257. Bupati Tuban
258. Bupati Tulungagung
259. Walikota Blitar
260. Walikota Kediri
261. Walikota Madiun
262. Walikota Malang
263. Walikota Mojokerto
264. Walikota Pasuruan
265. Walikota Probolinggo
266. Walikota Batu
267. Bupati Bengkayang
268. Bupati Landak
269. Bupati Kapuas Hulu
270. Bupati Ketapang
271. Bupati Mempawah
272. Bupati Sambas
273. Bupati Sanggau
274. Bupati Sintang
275. Walikota Singkawang
276. Bupati Sekadau
277. Bupati Melawi
278. Bupati Kayong Utara

279. Bupati Kubu Raya
280. Bupati Barito Selatan
281. Bupati Barito Utara
282. Bupati Kapuas
283. Bupati Kotawaringin Barat
284. Bupati Kotawaringin Timur
285. Bupati Katingan
286. Bupati Seruyan
287. Bupati Sukamara
288. Bupati Lamandau
289. Bupati Gunung Mas
290. Bupati Pulang Pisau
291. Bupati Murung Raya
292. Bupati Barito Timur
293. Bupati Banjar
294. Bupati Barito Kuala
295. Bupati Hulu Sungai Selatan
296. Bupati Hulu Sungai Tengah
297. Bupati Hulu Sungai Utara
298. Bupati Kotabaru
299. Bupati Tabalong
300. Bupati Tanah Laut
301. Bupati Tapin
302. Walikota Banjarbaru
303. Bupati Balangan
304. Bupati Tanah Bumbu
305. Bupati Berau
306. Bupati Kutai Kartanegara
307. Bupati Kutai Barat
308. Bupati Kutai Timur
309. Bupati Paser
310. Walikota Balikpapan
311. Walikota Bontang
312. Bupati Penajam Paser Utara
313. Bupati Mahakam Ulu
314. Bupati Bolaang Mongondow
315. Bupati Minahasa
316. Bupati Kepulauan Sangihe
317. Walikota Bitung
318. Bupati Kepulauan Talaud
319. Bupati Minahasa Selatan
320. Walikota Tomohon
321. Bupati Minahasa Utara
322. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
323. Walikota Kotamobagu
324. Bupati Bolaang Mongondow Utara
325. Bupati Minahasa Tenggara
326. Bupati Bolaang Mongondow Timur
327. Bupati Bolaang Mongondow Selatan
328. Bupati Banggai
329. Bupati Banggai Kepulauan
330. Bupati Buol
331. Bupati Tolitoli
332. Bupati Donggala
333. Bupati Morowali
334. Bupati Poso
335. Bupati Parigi Moutong
336. Bupati Tojo Una-Una
337. Bupati Sigi
338. Bupati Banggai Laut
339. Bupati Morowali Utara
340. Bupati Bantaeng
341. Bupati Barru
342. Bupati Bone
343. Bupati Bulukumba
344. Bupati Enrekang
345. Bupati Gowa
346. Bupati Jeneponto
347. Bupati Luwu
348. Bupati Luwu Utara
349. Bupati Maros
350. Bupati Pangkajene dan Kepulauan
351. Walikota Palopo
352. Bupati Luwu Timur
353. Bupati Pinrang
354. Bupati Sinjai
355. Bupati Kepulauan Selayar
356. Bupati Sidenreng Rappang
357. Bupati Soppeng
358. Bupati Takalar
359. Bupati Tana Toraja
360. Bupati Wajo
361. Walikota Pare-Pare
362. Bupati Toraja Utara
363. Bupati Buton
364. Bupati Konawe
365. Bupati Kolaka
366. Bupati Muna
367. Walikota Bau-Bau
368. Bupati Konawe Selatan
369. Bupati Bombana
370. Bupati Wakatobi
371. Bupati Kolaka Utara
372. Bupati Konawe Utara
373. Bupati Buton Utara
374. Bupati Konawe Kepulauan
375. Bupati Kolaka Timur
376. Bupati Muna Barat
377. Bupati Buton Tengah
378. Bupati Buton Selatan
379. Bupati Badung
380. Bupati Bangli
381. Bupati Buleleng
382. Bupati Gianyar
383. Bupati Jembrana
384. Bupati Karangasem
385. Bupati Klungkung
386. Bupati Tabanan
387. Bupati Bima
388. Bupati Dompu
389. Bupati Lombok Barat
390. Bupati Lombok Tengah
391. Bupati Lombok Timur
392. Bupati Sumbawa
393. Walikota Bima
394. Bupati Sumbawa Barat
395. Bupati Lombok Utara
396. Bupati Alor
397. Bupati Belu
398. Bupati Ende
399. Bupati Flores Timur
400. Bupati Kupang
401. Bupati Lembata
402. Bupati Manggarai
403. Bupati Ngada
404. Bupati Sikka
405. Bupati Sumba Barat
406. Bupati Sumba Timur
407. Bupati Timor Tengah Selatan
408. Bupati Timor Tengah Utara
409. Bupati Rote Ndao
410. Bupati Manggarai Barat
411. Bupati Nagekeo
412. Bupati Sumba Barat Daya
413. Bupati Sumba Tengah
414. Bupati Manggarai Timur
415. Bupati Sabu Raijua
416. Bupati Malaka
417. Bupati Maluku Tenggara Barat
418. Bupati Maluku Tengah
419. Bupati Maluku Tenggara

420. Bupati Buru
421. Bupati Seram Bagian Barat
422. Bupati Seram Bagian Timur
423. Bupati Kepulauan Aru
424. Walikota Tual
425. Bupati Maluku Barat Daya
426. Bupati Buru Selatan
427. Bupati Biak Numfor
428. Bupati Jayapura
429. Bupati Jayawijaya
430. Bupati Merauke
431. Bupati Mimika
432. Bupati Nabire
433. Bupati Paniai
434. Bupati Puncak Jaya
435. Bupati Kepulauan Yapen
436. Bupati Sarmi
437. Bupati Keerom
438. Bupati Yahukimo
439. Bupati Pegunungan Bintang
440. Bupati Tolikara
441. Bupati Boven Digoel
442. Bupati Mappi
443. Bupati Asmat
444. Bupati Waropen
445. Bupati Supiori
446. Bupati Mamberamo Raya
447. Bupati Mamberamo Tengah
448. Bupati Yalimo
449. Bupati Lanny Jaya
450. Bupati Nduga
451. Bupati Dogiyai
452. Bupati Puncak
453. Bupati Intan Jaya
454. Bupati Deiyai
455. Bupati Halmahera Tengah
456. Walikota Ternate
457. Bupati Halmahera Barat
458. Bupati Halmahera Timur
459. Bupati Halmahera Selatan
460. Bupati Halmahera Utara
461. Bupati Kepulauan Sula
462. Bupati Pulau Morotai
463. Bupati Pulau Taliabu
464. Bupati Lebak
465. Bupati Pandeglang
466. Bupati Serang
467. Bupati Tangerang
468. Walikota Cilegon
469. Walikota Tangerang
470. Walikota Tangerang Selatan
471. Bupati Bangka
472. Bupati Belitung
473. Bupati Bangka Selatan
474. Bupati Bangka Tengah
475. Bupati Bangka Barat
476. Bupati Belitung Timur
477. Bupati Boalemo
478. Bupati Gorontalo
479. Bupati Pohuwato
480. Bupati Bone Bolango
481. Bupati Gorontalo Utara
482. Bupati Natuna
483. Bupati Kepulauan Anambas
484. Bupati Karimun
485. Walikota Batam
486. Bupati Lingga
487. Bupati Bintan
488. Bupati Fakfak
489. Bupati Sorong
490. Walikota Sorong
491. Bupati Raja Ampat
492. Bupati Sorong Selatan
493. Bupati Teluk Bintuni
494. Bupati Teluk Wondama
495. Bupati Kaimana
496. Bupati Maybrat
497. Bupati Tambrauw
498. Bupati Manokwari Selatan
499. Bupati Pegunungan Arfak
500. Bupati Majene
501. Bupati Polewali Mandar
502. Bupati Mamasa
503. Bupati Pasang Kayu
504. Bupati Mamuju Tengah
505. Bupati Malinau
506. Bupati Nunukan
507. Walikota Tarakan
508. Bupati Tana Tidung

Inspektur Daerah

1. Inspektur Kota Banda Aceh
2. Inspektur Kota Medan
3. Inspektur Kota Padang
4. Inspektur Kota Palembang
5. Inspektur Kota Bengkulu
6. Inspektur Kota Jambi
7. Inspektur Kota Pekanbaru
8. Inspektur Kota Tanjung Pinang
9. Inspektur Kota Pangkalpinang
10. Inspektur Kota Bandar Lampung
11. Inspektur Kota Serang
12. Inspektur Kota Bandung
13. Inspektur Kota Semarang
14. Inspektur Kota Yogyakarta
15. Inspektur Kota Surabaya
16. Inspektur Kota Pontianak
17. Inspektur Kota Banjarmasin
18. Inspektur Kota Palangkaraya
19. Inspektur Kota Samarinda
20. Inspektur Kota Denpasar
21. Inspektur Kota Mataram
22. Inspektur Kota Kupang
23. Inspektur Kota Manado
24. Inspektur Kota Makassar
25. Inspektur Kota Palu
26. Inspektur Kota Kendari
27. Inspektur Kota Gorontalo
28. Inspektur Kota Ambon
29. Inspektur Kota Tidore Kepulauan
30. Inspektur Kota Jayapura
31. Inspektur Kab. Bulungan
32. Inspektur Kab. Mamuju
33. Inspektur Kab. Manokwari
34. Inspektur Kab. Aceh Barat
35. Inspektur Kab. Aceh Besar
36. Inspektur Kab. Aceh Selatan
37. Inspektur Kab. Aceh Singkil
38. Inspektur Kab. Aceh Tengah
39. Inspektur Kab. Aceh Tenggara
40. Inspektur Kab. Aceh Timur
41. Inspektur Kab. Aceh Utara
42. Inspektur Kab. Bireuen
43. Inspektur Kab. Pidie
44. Inspektur Kab. Simeulue
45. Inspektur Kota Sabang
46. Inspektur Kota Langsa
47. Inspektur Kota Lhokseumawe
48. Inspektur Kab. Gayo Lues
49. Inspektur Kab. Aceh Barat Daya
50. Inspektur Kab. Aceh Jaya
51. Inspektur Kab. Nagan Raya
52. Inspektur Kab. Aceh Tamiang
53. Inspektur Kab. Bener Meriah
54. Inspektur Kab. Pidie Jaya
55. Inspektur Kota Subulussalam
56. Inspektur Kab. Asahan
57. Inspektur Kab. Dairi
58. Inspektur Kab. Deli Serdang
59. Inspektur Kab. Karo
60. Inspektur Kab. Labuhanbatu
61. Inspektur Kab. Langkat
62. Inspektur Kab. Mandailing Natal
63. Inspektur Kab. Nias
64. Inspektur Kab. Simalungun
65. Inspektur Kab. Tapanuli Selatan
66. Inspektur Kab. Tapanuli Tengah
67. Inspektur Kab. Tapanuli Utara
68. Inspektur Kab. Toba Samosir
69. Inspektur Kota Binjai
70. Inspektur Kota Pematang Siantar
71. Inspektur Kota Sibolga
72. Inspektur Kota Tanjung Balai
73. Inspektur Kota Tebing Tinggi
74. Inspektur Kota Padang Sidempuan
75. Inspektur Kab. Pakpak Bharat
76. Inspektur Kab. Nias Selatan
77. Inspektur Kab. Humbang Hasundutan
78. Inspektur Kab. Serdang Bedagai
79. Inspektur Kab. Samosir
80. Inspektur Kab. Batu Bara
81. Inspektur Kab. Padang Lawas
82. Inspektur Kab. Padang Lawas Utara
83. Inspektur Kab. Labuhanbatu Selatan
84. Inspektur Kab. Labuhanbatu Utara
85. Inspektur Kab. Nias Utara
86. Inspektur Kab. Nias Barat
87. Inspektur Kota Gunungsitoli
88. Inspektur Kab. Limapuluh Kota
89. Inspektur Kab. Agam
90. Inspektur Kab. Kepulauan Mentawai
91. Inspektur Kab. Padang Pariaman
92. Inspektur Kab. Pasaman
93. Inspektur Kab. Pesisir Selatan
94. Inspektur Kab. Sijunjung
95. Inspektur Kab. Solok
96. Inspektur Kab. Tanah Datar
97. Inspektur Kota Bukit Tinggi
98. Inspektur Kota Padang Panjang
99. Inspektur Kota Payakumbuh
100. Inspektur Kota Sawahlunto
101. Inspektur Kota Solok
102. Inspektur Kota Pariaman
103. Inspektur Kab. Pasaman Barat
104. Inspektur Kab. Dharmasraya
105. Inspektur Kab. Solok Selatan
106. Inspektur Kab. Bengkalis
107. Inspektur Kab. Indragiri Hilir
108. Inspektur Kab. Indragiri Hulu
109. Inspektur Kab. Kampar
110. Inspektur Kab. Kuantan Singingi
111. Inspektur Kab. Pelalawan
112. Inspektur Kab. Rokan Hilir
113. Inspektur Kab. Rokan Hulu
114. Inspektur Kab. Siak
115. Inspektur Kota Dumai
116. Inspektur Kab. Kepulauan Meranti
117. Inspektur Kab. Batanghari
118. Inspektur Kab. Bungo
119. Inspektur Kab. Kerinci
120. Inspektur Kab. Merangin
121. Inspektur Kab. Muaro Jambi

122. Inspektur Kab. Sarolangun
123. Inspektur Kab. Tanjung Jabung Barat
124. Inspektur Kab. Tanjung Jabung Timur
125. Inspektur Kab. Tebo
126. Inspektur Kota Sungai Penuh
127. Inspektur Kab. Lahat
128. Inspektur Kab. Musi Banyuasin
129. Inspektur Kab. Musi Rawas
130. Inspektur Kab. Muara Enim
131. Inspektur Kab. Ogan Komering Ilir
132. Inspektur Kab. Ogan Komering Ulu
133. Inspektur Kota Prabumulih
134. Inspektur Kota Pagar Alam
135. Inspektur Kota Lubuk Linggau
136. Inspektur Kab. Banyuasin
137. Inspektur Kab. Ogan Ilir
138. Inspektur Kab. OKU Timur
139. Inspektur Kab. OKU Selatan
140. Inspektur Kab. Empat Lawang
141. Inspektur Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
142. Inspektur Kab. Musi Rawas Utara
143. Inspektur Kab. Bengkulu Selatan
144. Inspektur Kab. Bengkulu Utara
145. Inspektur Kab. Rejang Lebong
146. Inspektur Kab. Kaur
147. Inspektur Kab. Seluma
148. Inspektur Kab. Mukomuko
149. Inspektur Kab. Lebong
150. Inspektur Kab. Kepahiang
151. Inspektur Kab. Bengkulu Tengah
152. Inspektur Kab. Lampung Barat
153. Inspektur Kab. Lampung Selatan
154. Inspektur Kab. Lampung Tengah
155. Inspektur Kab. Lampung Utara
156. Inspektur Kab. Lampung Timur
157. Inspektur Kab. Tanggamus
158. Inspektur Kab. Tulang Bawang
159. Inspektur Kab. Way Kanan
160. Inspektur Kota Metro
161. Inspektur Kab. Pesawaran
162. Inspektur Kab. Pringsewu
163. Inspektur Kab. Mesuji
164. Inspektur Kab. Tulang Bawang Barat
165. Inspektur Kab. Pesisir Barat
166. Inspektur Kab. Bandung
167. Inspektur Kab. Bekasi
168. Inspektur Kab. Bogor
169. Inspektur Kab. Ciamis
170. Inspektur Kab. Cianjur
171. Inspektur Kab. Cirebon
172. Inspektur Kab. Garut
173. Inspektur Kab. Indramayu
174. Inspektur Kab. Karawang
175. Inspektur Kab. Kuningan
176. Inspektur Kab. Majalengka
177. Inspektur Kab. Purwakarta
178. Inspektur Kab. Subang
179. Inspektur Kab. Sukabumi
180. Inspektur Kab. Sumedang
181. Inspektur Kab. Tasikmalaya
182. Inspektur Kota Bekasi
183. Inspektur Kota Bogor
184. Inspektur Kota Cirebon
185. Inspektur Kota Depok
186. Inspektur Kota Sukabumi
187. Inspektur Kota Tasikmalaya
188. Inspektur Kota Cimahi
189. Inspektur Kota Banjar
190. Inspektur Kab. Bandung Barat
191. Inspektur Kab. Pangandaran
192. Inspektur Kab. Banjarnegara
193. Inspektur Kab. Banyumas
194. Inspektur Kab. Batang
195. Inspektur Kab. Blora
196. Inspektur Kab. Boyolali
197. Inspektur Kab. Brebes
198. Inspektur Kab. Cilacap
199. Inspektur Kab. Demak
200. Inspektur Kab. Grobogan
201. Inspektur Kab. Jepara
202. Inspektur Kab. Karanganyar
203. Inspektur Kab. Kebumen
204. Inspektur Kab. Kendal
205. Inspektur Kab. Klaten
206. Inspektur Kab. Kudus
207. Inspektur Kab. Magelang
208. Inspektur Kab. Pati
209. Inspektur Kab. Pekalongan
210. Inspektur Kab. Pemalang
211. Inspektur Kab. Purbalingga
212. Inspektur Kab. Purworejo
213. Inspektur Kab. Rembang
214. Inspektur Kab. Semarang
215. Inspektur Kab. Sragen
216. Inspektur Kab. Sukoharjo
217. Inspektur Kab. Tegal
218. Inspektur Kab. Temanggung
219. Inspektur Kab. Wonogiri
220. Inspektur Kab. Wonosobo
221. Inspektur Kota Magelang
222. Inspektur Kota Pekalongan
223. Inspektur Kota Salatiga
224. Inspektur Kota Surakarta
225. Inspektur Kota Tegal
226. Inspektur Kab. Bantul
227. Inspektur Kab. Gunung Kidul
228. Inspektur Kab. Kulon Progo
229. Inspektur Kab. Sleman
230. Inspektur Kab. Bangkalan
231. Inspektur Kab. Banyuwangi
232. Inspektur Kab. Blitar
233. Inspektur Kab. Bojonegoro
234. Inspektur Kab. Bondowoso
235. Inspektur Kab. Gresik
236. Inspektur Kab. Jember
237. Inspektur Kab. Jombang
238. Inspektur Kab. Kediri
239. Inspektur Kab. Lamongan
240. Inspektur Kab. Lumajang
241. Inspektur Kab. Madiun
242. Inspektur Kab. Magetan
243. Inspektur Kab. Malang
244. Inspektur Kab. Mojokerto
245. Inspektur Kab. Nganjuk
246. Inspektur Kab. Ngawi
247. Inspektur Kab. Pacitan

248. Inspektur Kab. Pamekasan
249. Inspektur Kab. Pasuruan
250. Inspektur Kab. Ponorogo
251. Inspektur Kab. Probolinggo
252. Inspektur Kab. Sampang
253. Inspektur Kab. Sidoarjo
254. Inspektur Kab. Situbondo
255. Inspektur Kab. Sumenep
256. Inspektur Kab. Trenggalek
257. Inspektur Kab. Tuban
258. Inspektur Kab. Tulungagung
259. Inspektur Kota Blitar
260. Inspektur Kota Kediri
261. Inspektur Kota Madiun
262. Inspektur Kota Malang
263. Inspektur Kota Mojokerto
264. Inspektur Kota Pasuruan
265. Inspektur Kota Probolinggo
266. Inspektur Kota Batu
267. Inspektur Kab. Bengkayang
268. Inspektur Kab. Landak
269. Inspektur Kab. Kapuas Hulu
270. Inspektur Kab. Ketapang
271. Inspektur Kab. Mempawah
272. Inspektur Kab. Sambas
273. Inspektur Kab. Sanggau
274. Inspektur Kab. Sintang
275. Inspektur Kota Singkawang
276. Inspektur Kab. Sekadau
277. Inspektur Kab. Melawi
278. Inspektur Kab. Kayong Utara
279. Inspektur Kab. Kubu Raya
280. Inspektur Kab. Barito Selatan
281. Inspektur Kab. Barito Utara
282. Inspektur Kab. Kapuas
283. Inspektur Kab. Kotawaringin Barat
284. Inspektur Kab. Kotawaringin Timur
285. Inspektur Kab. Katingan
286. Inspektur Kab. Seruyan
287. Inspektur Kab. Sukamara
288. Inspektur Kab. Lamandau
289. Inspektur Kab. Gunung Mas
290. Inspektur Kab. Pulang Pisau
291. Inspektur Kab. Murung Raya
292. Inspektur Kab. Barito Timur
293. Inspektur Kab. Banjar
294. Inspektur Kab. Barito Kuala
295. Inspektur Kab. Hulu Sungai Selatan
296. Inspektur Kab. Hulu Sungai Tengah
297. Inspektur Kab. Hulu Sungai Utara
298. Inspektur Kab. Kotabaru
299. Inspektur Kab. Tabalong
300. Inspektur Kab. Tanah Laut
301. Inspektur Kab. Tapin
302. Inspektur Kota Banjarbaru
303. Inspektur Kab. Balangan
304. Inspektur Kab. Tanah Bumbu
305. Inspektur Kab. Berau
306. Inspektur Kab. Kutai Kartanegara
307. Inspektur Kab. Kutai Barat
308. Inspektur Kab. Kutai Timur
309. Inspektur Kab. Paser
310. Inspektur Kota Balikpapan
311. Inspektur Kota Bontang
312. Inspektur Kab. Penajam Paser Utara
313. Inspektur Kab. Mahakam Ulu
314. Inspektur Kab. Bolaang Mongondow
315. Inspektur Kab. Minahasa
316. Inspektur Kab. Kepulauan Sangihe
317. Inspektur Kota Bitung
318. Inspektur Kab. Kepulauan Talaud
319. Inspektur Kab. Minahasa Selatan
320. Inspektur Kota Tomohon
321. Inspektur Kab. Minahasa Utara
322. Inspektur Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
323. Inspektur Kota Kotamobagu
324. Inspektur Kab. Bolaang Mongondow Utara
325. Inspektur Kab. Minahasa Tenggara
326. Inspektur Kab. Bolaang Mongondow Timur
327. Inspektur Kab. Bolaang Mongondow Selatan
328. Inspektur Kab. Banggai
329. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan
330. Inspektur Kab. Buol
331. Inspektur Kab. Tolitoli
332. Inspektur Kab. Donggala
333. Inspektur Kab. Morowali
334. Inspektur Kab. Poso
335. Inspektur Kab. Parigi Moutong
336. Inspektur Kab. Tojo Una-Una
337. Inspektur Kab. Sigi
338. Inspektur Kab. Banggai Laut
339. Inspektur Kab. Morowali Utara
340. Inspektur Kab. Bantaeng
341. Inspektur Kab. Barru
342. Inspektur Kab. Bone
343. Inspektur Kab. Bulukumba
344. Inspektur Kab. Enrekang
345. Inspektur Kab. Gowa
346. Inspektur Kab. Jeneponto
347. Inspektur Kab. Luwu
348. Inspektur Kab. Luwu Utara
349. Inspektur Kab. Maros
350. Inspektur Kab. Pangkajene dan Kepulauan
351. Inspektur Kota Palopo
352. Inspektur Kab. Luwu Timur
353. Inspektur Kab. Pinrang
354. Inspektur Kab. Sinjai
355. Inspektur Kab. Kepulauan Selayar
356. Inspektur Kab. Sidenreng Rappang
357. Inspektur Kab. Soppeng
358. Inspektur Kab. Takalar
359. Inspektur Kab. Tana Toraja
360. Inspektur Kab. Wajo
361. Inspektur Kota Pare-Pare
362. Inspektur Kab. Toraja Utara
363. Inspektur Kab. Buton
364. Inspektur Kab. Konawe
365. Inspektur Kab. Kolaka
366. Inspektur Kab. Muna
367. Inspektur Kota Bau-Bau
368. Inspektur Kab. Konawe Selatan
369. Inspektur Kab. Bombana
370. Inspektur Kab. Wakatobi

371. Inspektur Kab. Kolaka Utara
372. Inspektur Kab. Konawe Utara
373. Inspektur Kab. Buton Utara
374. Inspektur Kab. Konawe Kepulauan
375. Inspektur Kab. Kolaka Timur
376. Inspektur Kab. Muna Barat
377. Inspektur Kab. Buton Tengah
378. Inspektur Kab. Buton Selatan
379. Inspektur Kab. Badung
380. Inspektur Kab. Bangli
381. Inspektur Kab. Buleleng
382. Inspektur Kab. Gianyar
383. Inspektur Kab. Jembrana
384. Inspektur Kab. Karangasem
385. Inspektur Kab. Klungkung
386. Inspektur Kab. Tabanan
387. Inspektur Kab. Bima
388. Inspektur Kab. Dompu
389. Inspektur Kab. Lombok Barat
390. Inspektur Kab. Lombok Tengah
391. Inspektur Kab. Lombok Timur
392. Inspektur Kab. Sumbawa
393. Inspektur Kota Bima
394. Inspektur Kab. Sumbawa Barat
395. Inspektur Kab. Lombok Utara
396. Inspektur Kab. Alor
397. Inspektur Kab. Belu
398. Inspektur Kab. Ende
399. Inspektur Kab. Flores Timur
400. Inspektur Kab. Kupang
401. Inspektur Kab. Lembata
402. Inspektur Kab. Manggarai
403. Inspektur Kab. Ngada
404. Inspektur Kab. Sikka
405. Inspektur Kab. Sumba Barat
406. Inspektur Kab. Sumba Timur
407. Inspektur Kab. Timor Tengah Selatan
408. Inspektur Kab. Timor Tengah Utara
409. Inspektur Kab. Rote Ndao
410. Inspektur Kab. Manggarai Barat
411. Inspektur Kab. Nagekeo
412. Inspektur Kab. Sumba Barat Daya
413. Inspektur Kab. Sumba Tengah
414. Inspektur Kab. Manggarai Timur
415. Inspektur Kab. Sabu Raijua
416. Inspektur Kab. Malaka
417. Inspektur Kab. Maluku Tenggara Barat
418. Inspektur Kab. Maluku Tengah
419. Inspektur Kab. Maluku Tenggara
420. Inspektur Kab. Buru
421. Inspektur Kab. Seram Bagian Barat
422. Inspektur Kab. Seram Bagian Timur
423. Inspektur Kab. Kepulauan Aru
424. Inspektur Kota Tual
425. Inspektur Kab. Maluku Barat Daya
426. Inspektur Kab. Buru Selatan
427. Inspektur Kab. Biak Numfor
428. Inspektur Kab. Jayapura
429. Inspektur Kab. Jayawijaya
430. Inspektur Kab. Merauke
431. Inspektur Kab. Mimika
432. Inspektur Kab. Nabire
433. Inspektur Kab. Paniai
434. Inspektur Kab. Puncak Jaya
435. Inspektur Kab. Kepulauan Yapen
436. Inspektur Kab. Sarmi
437. Inspektur Kab. Keerom
438. Inspektur Kab. Yahukimo
439. Inspektur Kab. Pegunungan Bintang
440. Inspektur Kab. Tolikara
441. Inspektur Kab. Boven Digoel
442. Inspektur Kab. Mappi
443. Inspektur Kab. Asmat
444. Inspektur Kab. Waropen
445. Inspektur Kab. Supiori
446. Inspektur Kab. Mamberamo Raya
447. Inspektur Kab. Mamberamo Tengah
448. Inspektur Kab. Yalimo
449. Inspektur Kab. Lanny Jaya
450. Inspektur Kab. Nduga
451. Inspektur Kab. Dogiyai
452. Inspektur Kab. Puncak
453. Inspektur Kab. Intan Jaya
454. Inspektur Kab. Deiyai
455. Inspektur Kab. Halmahera Tengah
456. Inspektur Kota Ternate
457. Inspektur Kab. Halmahera Barat
458. Inspektur Kab. Halmahera Timur
459. Inspektur Kab. Halmahera Selatan
460. Inspektur Kab. Halmahera Utara
461. Inspektur Kab. Kepulauan Sula
462. Inspektur Kab. Pulau Morotai
463. Inspektur Kab. Pulau Taliabu
464. Inspektur Kab. Lebak
465. Inspektur Kab. Pandeglang
466. Inspektur Kab. Serang
467. Inspektur Kab. Tangerang
468. Inspektur Kota Cilegon
469. Inspektur Kota Tangerang
470. Inspektur Kota Tangerang Selatan
471. Inspektur Kab. Bangka
472. Inspektur Kab. Belitung
473. Inspektur Kab. Bangka Selatan
474. Inspektur Kab. Bangka Tengah
475. Inspektur Kab. Bangka Barat
476. Inspektur Kab. Belitung Timur
477. Inspektur Kab. Boalemo
478. Inspektur Kab. Gorontalo
479. Inspektur Kab. Pohuwato
480. Inspektur Kab. Bone Bolango
481. Inspektur Kab. Gorontalo Utara
482. Inspektur Kab. Natuna
483. Inspektur Kab. Kepulauan Anambas
484. Inspektur Kab. Karimun
485. Inspektur Kota Batam
486. Inspektur Kab. Lingga
487. Inspektur Kab. Bintan

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| 488. Inspektur Kab. Fakfak | 495. Inspektur Kab. Kaimana | Mandar |
| 489. Inspektur Kab. Sorong | 496. Inspektur Kab. Maybrat | 502. Inspektur Kab. Mamasa |
| 490. Inspektur Kota Sorong | 497. Inspektur Kab. Tambrau | 503. Inspektur Kab. Pasang Kayu |
| 491. Inspektur Kab. Raja Ampat | 498. Inspektur Kab. Manokwari | 504. Inspektur Kab. Mamuju |
| 492. Inspektur Kab. Sorong
Selatan | 499. Inspektur Kab. Pegunungan
Arfak | 505. Inspektur Kab. Malinau |
| 493. Inspektur Kab. Teluk Bintuni | 500. Inspektur Kab. Majene | 506. Inspektur Kab. Nunukan |
| 494. Inspektur Kab. Teluk
Wondama | 501. Inspektur Kab. Polewali | 507. Inspektur Kota Tarakan |
| | | 508. Inspektur Kab. Tana Tidung |